PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Korupsi Anggaran Desa Capai Rp107 M

Meningkat Sejak Empat Tahun Belakangan

JAKARTA – Polemik desa fiktif dalam program dana desa sudah menarik perhatian publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap besar pemerintah lebih serius menangani persoalan tersebut. Bukan malah saling bantah. Mereka mencatat, korupsi di level desa semakin marak. Berdasar data, sejak 2015 sampai 2018 ada total 252 kasus korupsi yang terkait dengan anggaran desa.

Aktivis ICW Egi Primayogha menjelaskan bahwa jumlah kasus terbanyak terjadi pada 2017 dan 2018 lalu. Dengan total kasus sebanyak 194 kasus. Sedangkan dari 2015 sampai 2017 ada kenaikan cukup besar. Yakni 22 kasus pada 2015, 48 kasus pada 2016, dan 98 kasus pada 2018. Dia pun menyebut beberapa modus. "Di antaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan, dan suap," ujarnya.

Jumlah kepala desa yang tercatat kena kasus korupsi juga semakin banyak. Egi menyebutkan, sedikitnya 214 kepala desa yang harus berurusan dengan kasus korupsi. Dengan rincian, 15 kepala desa pada 2015, 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018. Kondisi itu membuktikan semakin banyak kepala desa berani bermain anggaran.

KORUPSI ANGGARAN DESA

TAHUN	JUMLAH KASUS	KADES TERLIBAT
2015	22	15
2016	48	61
2017	96	66
2018	98	89

SUMBER: ICW

GRAFIS: BUDIKECIK/PONTIANAKPOST

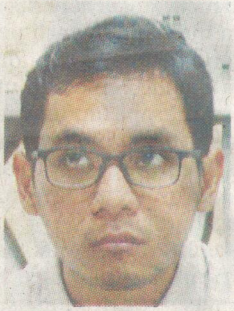

Egi Primayogha

Walau korupsi terjadi di level desa, kerugian negara yang harus ditanggung akibat korupsi di desa-desa tidak sedikit. "Total pada 2015 – 2018 negara merugi Rp 107,7 miliar akibat korupsi anggaran desa," terang Egi. Lebih mengkhawatirkan lagi lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menemukan masalah

◆Ke Halaman 7 kolom 1

Korupsi Anggaran Desa Capai Rp107 M

Sambungan dari halaman 1

dalam penyaluran dana desa. "Penyaluran dana desa tidak berdasarkan data yang mutakhir," imbuhnya.

Egi menyebut, temuan itu ada dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II 2018. Terhadap kondisi itu, dia menilai bahwa seluruh instansi pemerintah yang punya tanggung jawab terhadap desa-desa harus kompak. "Segera turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif," terangnya. Tentu saja bukan pemeriksaan asal, melainkan pemeriksaan menyeluruh.

Artinya tidak hanya desa terindikasi fiktif saja tetapi juga seluruh desa di tanah air. "Dalam hal pendataan, semestinya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT bertanggungjawab," kata Egi. "Verifikasi perihal data desa penting untuk dilakukan agar dana desa yang tersalurkan tak salah sasaran atau disalahgunakan," tambahnya. Dengan begitu data desa benar-benar akurat.

Dia menambahkan, masalah pendataan desa yang tidak akurat oleh pemerintah daerah mestinya bisa diatasi lewat mekanisme pengawasan, pembinaan, serta sinergi antara instansi. "Semua pihak harus serius menuntaskan polemik desa fiktif. Tak boleh lagi ada silang pendapat atau upaya menutup-nutupi persoalan," bebernya. Tujuannya tidak lain menyelamatkan anggaran untuk rakyat di desa-desa.

Karena itu, hasil pemeriksaan tersebut nantinya harus diumumkan secara terbuka kepada publik. "Tidak boleh ada upaya menutup-nutupi dengan alasan agar tak menimbulkan kegaduhan," imbuhnya. Apabila desa fiktif benar-benar terbukti ada, yang paling dirugikan adalah publik. Sebab, dana desa digelontorkan dari anggaran negara yang berasal dari masyarakat. *(syn)*